



PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILU 2024 MENUJU G2G GOOD GOVERNMENT TO GOVERNANCE DI INDONESIA

Deni Permana¹

¹Administrasi Publik STISIP Banten Raya Pandeglang Banten
Email: pdeni.permana. @gmail.com

Abstrak

Pesta demokrasi memilih secara langsung jujur adil transparan dalam menentukan masa depan bangsa dan negara indonesia lima tahun yang kan datang dimana para peserta pemilu saat ini di dominasi oleh gen z dan pemilih tetap, masyarakat saat ini sudah sadar digital dimana sebelum memilih mereka melihat rekam jejak digital para calon eksekutif legislatif dan yudikatif dimana adakah sumbangsih mereka terhadap bangsa dan negara cinta terhadap tanah air cinta kepada rakyat indonesia sehingga masyarakat dan gen z tidak sungkan tidak ragu dalam memilih calon DPRD, DPR-RI, DPD-RI, Capres dan Cawapres untuk indonesia limatahun yang akan datang periode 2024-2029. Penelitian yang penulis gunakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat secara objektif dan selektif dalam pesta demokrasi pemilihan umum 14 februari 2024.

Kata Kunci: Partisipasi, Demokrasi, Pemilu 2024

Abstrack

It is now December 2023 that the Indonesian people will hold general elections for candidates for DPRD members, DPR-RI, DPD-RI, presidential and vice presidential candidates. It is approaching the 2024 election in less than 75 days that the Indonesian people will hold a democratic party to vote directly honestly fair transparently in determining the future of the nation and state of Indonesia for the next five years where the current election participants are dominated by gen z and permanent voters, people are now digitally aware where before voting they see the digital track record of legislative and judicial executive candidates where is their contribution to the nation and state love for the homeland love for the Indonesian people so that the community and gen z do not hesitate not hesitate in choosing candidates for DPRD, DPR-RI, DPD-RI, Presidential and Vice Presidential Candidates for Indonesia five years to come period 2024-2029. The research that the author uses research with qualitative descriptive methods to analyze phenomena, events, or social conditions. The results obtained from this research are how the community is objective and selective in the democratic party of the general election of 14 February 2024.

Keyword: Election 2024, Democracy, Participation

PENDAHULUAN

Conyers mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan (Conyers, 1981). Selain itu, Arif (2012) mendefinisikan partisipasi sebagai bentuk keterlibatan yang sifatnya spontan yang didasari oleh kesadaran secara penuh serta tanggung jawab terhadap kepentingan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Definisi lainnya menurut Isbandi (2007) adalah partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di sekitar masyarakat, kemudian dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, proses pelaksanaan upaya mengatasi masalah tersebut serta keterlibatannya dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sementara itu, Yadav (dalam UNAPDI, 1980) menjelaskan bahwa terdapat empat kegiatan yang dapat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yakni:

partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil kegiatan. (Kusuma et al., 2022)

Definisi lainnya diungkapkan oleh Djalal dan Supriadi (2001) bahwa partisipasi diartikan berupa keterlibatan masyarakat atau kelompok dalam menyampaikan saran atau pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan, menyalurkan barang, keterampilan serta jasa yang dimiliki untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, disebutkan pula bahwa kelompok yang dapat mengenal masalahnya, menyuarakan pilihannya, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya juga termasuk dalam kriteria partisipasi. (Lestari et al., 2023)

Tilaar (2009) menjelaskan partisipasi sebagai wujud keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan dengan perencanaan dari bawah yang mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di masyarakat. Secara sederhana, partisipasi dapat dimaknai sebagai “the act of taking part Or sharing in something” (Cornwall, 2001). Bank Dunia memberikan batasan partisipasi masyarakat, pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkay keuntungan dari program tersebut (dalam Neeraj, 2010).

Mikkelsen (1999) menjelaskan definisi partisipasi menjadi esay definisi, yaitu sebagai berikut. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada suatu kegiatan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menentukan kegiatan tersebut. Partisipasi adalah proses yang menimbulkan kepekaan di dal diri masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima 29 kemampuan untuk menanggapi suatu kegiatan/isu di masyarakat Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri oleh masyarakat. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang di dalamnya orang atau kelompok yang berkaitan tersebut berinisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk berpartisipasi terhadap suatu kegiatan di masyarakat.

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para aparatur yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (Aditya Indra Renaldi, Ridwan Khairandy, 2022).

Perbedaan generasi dalam lingkungan kerja menjadi salah satu subjek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia, dan konsep perbedaan generasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada perbedaan karakteristik yang signifikan antara generasi Z dengan generasi lain. Salah satu faktor utama yang membedakan adalah penguasaan informasi dan teknologi. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan, karena generasi Z lahir dimana akses terhadap informasi, khususnya internet sudah menjadi budaya global, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai, pandangan dan tujuan hidup. Bangkitnya generasi Z juga akan menimbulkan tantangan baru bagi praktek manajemen dalam organisasi, khususnya bagi praktek manajemen sumber daya manusia. (Dasyah, 2021)

Zenerasi Z saat ini mendominasi dalam pesta demokrasi pemilu 2024 dimana Gen Z saat ini banyak sekali yang berusia 17 tahun dimana sudah memiliki kartu tanda penduduk dan wajib menentukan pilihan dan berpartisipasi dalam pemilu 2024 pada bulan februari 2024 pemilu tahun 2024 diwarnai dengan tiga pasang capres dan cawapres pada nomor urut 1 ada Anis Rasyid Baswedan sebagai calon presiden yang di usung oleh Partai Nasdem dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa dengan jargon nama panggilan pasangan nomor urut 1 adalah AMIN yang artinya Anis dan Cak Imin, pada nomor urut 2 ada pasangan calon presiden dari ketua umum partai gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gabran Rakabuming Raka Jaringan Relawan Prabowo Gibran Nasional (JARGON) deklarasi mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, nomor urut 3 calon presiden yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan calon wakil presiden Prof.

Mahfud MD dengan jargonnya Persatuan Indonesia tujuannya adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari bersuku-suku adat istiadat dari sabang samapi mauroke dimana semua bersatu padu.(A Zulkarnain et al., 2023)

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian adalah pemilu dan partai politik. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga merupakan wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yakni keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara.(Parties & Commission, 2023)

Pada hakikatnya, baik-buruknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara sangat tergantung dari kinerja dan pelaksanaan peranan dari alatalat demokrasi yang ada dalam negara tersebut. Alat-alat demokrasi itu adalah: 1) Partai politik, 2) Pemilihan Umum, dan 3) Lembaga-lembaga Negara. Penjelasanannya sebagai berikut:

Partai politik

Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang beragam pada setiap negara, antara lain:

- 1) Sistem satu partai (dianut oleh negara-negara komunis, seperti Republik Rakyat China)
- 2) Sistem dwi partai (dianut oleh negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat)
- 3) Sistem banyak partai/multi partai (dianut oleh negara berkembang, seperti Indonesia)(Lestari et al., 2023)

Partai politik itu sendiri dalam suatu negara memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat pasti ingin dilibatkan dalam bidang politik. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah tidak semuanya yang dapat diterima oleh rakyat. Rakyat boleh menyalurkan aspirasinya, baik untuk mendukung ataupun mengkritik kebijakan. Salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi tersebut adalah partai politik(Gui & Halim, 2023),

- 2) Peran sebagai sarana sosialisasi politik Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society), yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.(Aeni et al., 2023)

- 3) Peran sebagai sarana rekrutmen politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah kajian yang berkaitan dengan pertanyaan: bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik: (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut, merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak berlebihan

jika dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Arasid et al., 2022).

4) peran sebagai sarana pengatur konflik

Konflik atau pertentangan mengandung suatu pengeruan t ngkah laku yang lebih luas dari apa yang biasanya dibayangkan oleh kebanyakan orang. Secara umum, kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras. Namun sesungguhnya, dasar dari konflik berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu, (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik, (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antar unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik. Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama dengan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan/atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat. Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan antara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dapat bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain (Lestari et al., 2023).

Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai politik harus benar-benar mengakar di hati rakyat banyak peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lama pun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata pada saat pelaksanaan pemilihan umum sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. (Alamsyah et al., 2023)

Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam proses berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai:

1) Rotasi kekuasaan

Dalam sebuah negara demokrasi, rotasi kekuasaan mutlak harus ada. Seorang pemimpin selanjutnya hanya memerintah dalam periode yang dibatasi (bisa 2 kali periode saja). Banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan yang lebih dari dua kali periode akan menjurus ke arah pemerintahan yang diktator/tirani. Banyak contoh yang bisa disebutkan, seperti Presiden Soeharto (Indonesia) yang memerintah lebih dari 6 kali periode (32 tahun), Saddam Husein (Irak) yang memerintah dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2003 (24 tahun), dan pemerintahan yang lainnya yang semuanya menjurus ke arah diktator. (Studi et al., 2023)

2) Menciptakan perwakilan politik (dalam lembaga eksekutif dan legislatif) Pemilu bertujuan untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di tingkat pusat dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Para calon wakil rakyat ini diusung oleh partai politik dan diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi penciptaan harapan dan keinginan rakyat. (Fitrianti et al., 2023)

3) Sarana pendidikan politik Untuk diketahui bersama, pemilu tidak sekadar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Pendidikan politik menurut Alfian (1986: 235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan, bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis dalam rangka membentuk partisipasi politik. Partisipasi politik terwujud & keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik (Parties & Commission, 2023)

Good Government to Good Governance

Good government adalah pelayanan pemerintah harus berorientasi pada warga masyarakat, ini bermakna bahwa pelayanan yang diberikan kepada warga harus dengan cara-cara yang logis dan berpihak sehingga warga merasa pelayanan tersebut diperuntukan kepadanya. Pelayanan pemerintah harus dapat diakses yaitu bahwa semua jenis pelayanan yang diberikan secara elektronik baik itu melalui internet, telepon genggam, komputer, dan lain sebagainya, harus dapat diakses dengan mudah atau tanpa perlu bersusah payah. Pelayanan pemerintah harus bersifat inklusif, artinya adalah setiap pelayanan yang bersedia harus terus perbaiki dan tingkatkan agar dapat digunakan oleh setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali. Pengelolaan informasi, artinya bahwa pemerintah hanya menyediakan informasi-informasi yang rasional, jelas, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan sehingga semua informasi tersebut menjadi bernilai (Saepudin et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnomedia. Pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif ini akan dapat lebih menjelaskan bagaimana gen z memiliki karakter tersendiri dalam berpolitik sehingga dapat secara jelas bersaing dan sejajar dengan laki-laki. Kualitatif adalah metode yang hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan hasil dari konstruksi sebuah pemikiran sekaligus interpretasi karena didasari oleh paradigma interpretatif, sehingga kualitatif dianggap sebagai suatu dinamika terhadap suatu objek yang utuh. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik observasi dan mengumpulkan dokumentasi dari media massa. Karena sumber data yang diperoleh berasal dari literatur dan dokumentasi media massa. Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, dengan cara mengumpulkan data-data pendukung dari berbagai media massa mengenai politisi perempuan yang telah ditentukan dalam batasan penelitian ini. Data yang dianalisis adalah informasi terkait beberapa perempuan ketika menjadi politisi pada periode tertentu. Selain itu, literatur yang dianalisis diambil dari sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Fitrianti et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Cara Kerja Pemerintah (G2G) (Back Office Delivery) Inovasi cara kerja pemerintah merupakan penggunaan elektronik terhadap cara dan bagaimana pemerintah menjalankan aktivitas daya pekerjaannya, dengan tujuan untuk mereformasi proses kerja internal pemerintah yang lebih efisien. Dampak mereformasi proses kerja pemerintah ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: adanya integrasi dari sistem pelaporan antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga meningkatkan akurasi dan ketepatan, adanya pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk penggunaan basis data bersama sehingga meningkatkan efisiensi, memberikan peluang untuk adanya pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga-lembaga pemerintah sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan: pengambilan keputusan akan terkoneksi dan terkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga memungkinkan adanya partisipasi aktif yang menghasilkan suatu kesepakatan bersama. (Kurniawati, 2023)

Selanjutnya harus dipahami bahwa digitalisasi pemrosesan dokumen di lembaga pemerintahan dan gerakan menuju operasi pemerintah yang paperless ini adalah gerakan utama inovasi cara kerja pemerintah. Pertukaran e-Document diharapkan mampu menjamin efisiensi, keamanan, dan kredibilitas administrasi. Salah satu negara yang telah berinovasi pada cara kerja pemerintah dengan menggunakan e-government adalah Korea Selatan. Beberapa layanan tersebut terbagi di antaranya sebagai berikut. (Sari et al., 2023)

- a. Sistem Informasi Keuangan Nasional Terintegrasi, yaitu manajemen aktivitas keuangan nasional dilakukan secara real-time dengan menghubungkan 23 sistem terkait keuangan yang beroperasi secara independen di berbagai lembaga pemerintah.
- b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu dilakukannya otomatisasi dari 232 urusan pemerintah daerah, seperti pendataan penduduk dan properti atau real estate, keuangan, dan perpajakat pada level kota, kecamatan, dan desa.
- c. Sistem Informasi Pendidikan dan e-Learning, yaitu jaringan informasi negara yang menghubungkan sekolah-sekolah, kantor dinas pendidikan provinsi dan lembaga-lembaga di bawahnya serta departemen pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Pertukaran Dokumen Elektronik Pemerintah dan e-Processing, yaitu meliputi persiapan, penyetujuan, pendistribusian serta penyimpanan seluruh dokumen pemerintahan secara elektronik.

Sementara itu, Fang (2022) mengidentifikasi delapan model *e-government* berdasarkan jenis interaksi antara *stakeholder*

Model e-Government	Interaksi antar Stakeholder
Pemerintah ke masyarakat (G2C)	Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah kepada masyarakat.
Masyarakat ke pemerintah (C2G)	Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah ke bisnis (G2B)	Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh, sistem e-procurement.
Bisnis ke pemerintah (B2G)	Mengarah pada pemasaran produk dan jasa kepada pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik
Pemerintah ke pegawai (G2E)	Terdiri dari beberapa inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. Contohnya, sistem manajemen SDM <i>online</i> .
Pemerintah ke pemerintah (G2G)	Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi <i>online</i> antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi.
Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N)	Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial.
Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G)	Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.

Sumber: Fang (2022)

Hasil dari penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dan generasi z dalam pesta demokrasi menuju indonesia G2G government to governance sangat ditentukan oleh seluruh rakyat indonesia dimana rakyat indonesia adalah yang akan menentukan nasib bangsa dan negara indonesia dan akan ditentukan pada pemilu 2024 pada tanggal 14 februari. Sebagai masyarakat dan generasi z mari ikut serta dalam pemilihan umum pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali, setiap program kerja pemerintah tentu akan

didukung oleh rakyat Indonesia jika program tersebut tentunya dapat menciptakan inovasi publik yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan inovasi tersebut harus didukung oleh pemerintah dan pihak swasta saling kolaborasi dalam berinovasi.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dan generasi Z sebagai prinsip demokrasi sebetulnya menyangkut dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam kedudukannya sebagai warga negara ataupun sebagai pejabat yang diberi kewenangan. Perilaku partisipasi masyarakat adalah manifestasi dari kebudayaan sebab kebudayaan terwujud dan disalurkan melalui perilaku manusia. Berdasarkan dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak diwariskan dengan sendirinya akan tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Proses belajar demokrasi disebut dengan pendidikan demokrasi. Tujuannya pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik seperti generasi Z agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain itu agar dapat memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan). Tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai dalam menyongsong (G2G) Good Government to Good Governance sebagai salah satu wujud perkembangan bangsa dan negara.

REFERENCE

- A Zulkarnain, A., Ririn Septia, Robing, R., & Irvan Ansyari. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 193–210. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2474>
- Aditya Indra Renaldi, Ridwan Khairandy, B. A. P. (2022). Journal of Law Science. *Journal of Law Science*, 4(4), 179–187. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical
- Aeni, A. N., Sundari, C. E., & Saputra, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Politik Terhadap Persiapan Pemilu 2024. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 99–108. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index>
- Alamsyah, R., Rp, W. W., & Tartilla, N. (2023). *The Influence of Bank Health Levels on Share Prices in Conventional General Banking Listed on the Indonesian Stock Exchange for the Period 2019 – 2022*. 1(3), 173–184.
- Arasid, M. I., Djuyandi, Y., & Sumadinata, R. W. (2022). Strategi Komunikasi Politik Untuk Memperoleh Dukungan Pemuda Dalam Pilkada Kota Serang: Studi Pada Pasangan Calon Syafrudin-Subadri. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 62–77. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Dasyah, F. (2021). Journal of Law Science. *Journal of Law Science*, 3(2), 53–62. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical
- Fitrianti, R., Fiska Rahayu, L., & Saepudin, E. A. (2023). Gender perceptions in political speech: women and political style. *Ijobsor*, 11(2), 222–229. www.ijobsor.pelnus.ac.id
- Gui, M. D., & Halim, I. (2023). *Maintenance of National Values , the Role of Indonesian Language as Nationalism*. 1(3), 143–150.
- Kurniawati, A. L. (2023). Influence of Work Motivation, Work Environment, and Leadership Style on Employee Job Satisfaction at the Paser District Environmental Service. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 1(02), 100–108. <https://doi.org/10.59653/pancasila.v1i02.257>
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan*

- Berkarya*, 1(3), 75. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i3.364>
- Parties, P., & Commission, E. (2023). *Assessing the Feasibility and Implications of Implementing One Nation One Election in India*. 1(3), 185–196.
- Saepudin, E. A., Nugraheni, R. A., Rindiani, S., Rahmawati, J., & Septia, D. (2023). *SOCIALIZATION OF PUBLIC INFORMATION GOVERNANCE OF VILLAGE GOVERNMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN*. 3(2), 231–235.
- Sari, W. R., Wahyuddin, L. O., & Rosita, T. (2023). Influence of Work Abilities and Work Environment on Employee Performance in the Archives and Library Services of Paser District. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 2(01), 34–41.
<https://doi.org/10.59653/pancasila.v2i01.366>
- Studi, P., Publik, A., & Bangsa, U. B. (2023). *Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia*. 1, 70–78.